



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI XI DPR RI**

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PPN)/BAPPENAS, BANK INDONESIA (BI), OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK): PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB), LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), SETJEN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP), LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI), DAN BUMN (PMN DAN PRIVATISASI), DAN BADAN PENGELOLA INVESTASI (BPI) DAYA ANAGATA NUSANTARA (DANANTARA) DAN PENGELOLAAN HOLDING INVESTASI

Rapat Ke : 31
Tahun Sidang : 2025-2026
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat/ke- : Rapat Dengar Pendapat Umum / ke-1
Dengan : Calon Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan Periode 2025 - 2030
Sifat Rapat : **Terbuka**
Hari, Tanggal : Senin, 22 September 2025
Waktu : Pukul 18.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I
Ketua Rapat : **Dr. H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H**
(Ketua Komisi XI DPR RI)
Sekretaris Rapat : Danis Maya
(Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI)
Acara : Uji kelayakan (*fit and proper test*) Calon Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan Periode 2025 - 2030
Hadir : 1. ... orang dari **48 Anggota** Komisi XI DPR RI;
2. **AGRESIUS R. KADIAMAN;**
3. **DWITYAPOETRA SOEYASA BESAR;**
4. **MUHAMMAD IMAN NURIL HIDAYAT BUDI PINUJI;**
5. **FERDINAN DWIKORAJA PURBA;** dan
6. **ANGGITO ABIMANYU.**

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XI DPR RI dengan Calon Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan Periode 2025 – 2030 dilakukan dengan kehadiran secara fisik. Sesuai dengan ketentuan **Pasal 274** dan **Pasal 281** Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka rapat pukul **19.10 WIB** dan dinyatakan **terbuka** untuk umum.

2. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XI DPR RI dengan Calon Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Periode 2025 – 2030 diawali dengan pengantar dari Ketua Rapat dan dilanjutkan dengan pemaparan dari Calon Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Periode 2025 – 2030, kemudian dilakukan pendalaman/tanya jawab.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Calon Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Periode 2025 – 2030 yang mengikuti uji kelayakan (*fit and proper test*) sebagai berikut:
 - 1) AGRESIUS R. KADIAMAN;
 - 2) DWITYAPOETRA SOEYASA BESAR;
 - 3) MUHAMMAD IMAN NURIL HIDAYAT BUDI PINUJI;
 - 4) FERDINAN DWIKORAJA PURBA; dan
 - 5) ANGGITO ABIMANYU.
2. Masing-masing calon memaparkan materi sebagai berikut:
 - 1) *Curriculum Vitae* Calon Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Periode 2025 – 2030;
 - 2) Judul atau Tema materi;
 - 3) Visi dan Misi;
 - 4) Ringkasan singkat materi.Penjelasan terkait uji kelayakan (*fit and proper test*) Calon Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Periode 2025 – 2030 sebagaimana terlampir.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XI DPR RI dengan Calon Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Periode 2025 – 2030 ditutup pada pukul **22.00 WIB**.

Jakarta, 22 September 2025

**PIMPINAN KOMISI XI DPR RI
KETUA RAPAT,**



Dr. H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H

**RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI XI DPR RI DENGAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
PERIODE TAHUN 2025 - 2030**

SENIN, 22 SEPTEMBER 2025

Komisi XI DPR RI telah melakukan uji kelayakan terhadap 5 (lima) Calon Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yaitu sebagai berikut:

1	NAMA CALON	DWITYAPOETRA SOEYASA BESAR
	JUDUL	LPS Sinergi untuk Negeri: Memperkuat Kepercayaan, dan Menjaga Ketahanan Sektor Keuangan dalam Mendukung Indonesia yang Tangguh, Mandiri dan Sejahtera
	VISI DAN MISI	Visi: Tercapainya Kepercayaan dan Ketahanan Sektor Keuangan dan Ekonomi Nasional yang Berdaya Tahan, dan Tumbuh Kuat Secara Inklusif dan Berkelanjutan, menuju Indonesia yang Tangguh, Mandiri dan Sejahtera. Misi: 1. Kepercayaan: Memperkuat Kepercayaan Masyarakat terhadap LPS & Sektor Keuangan Indonesia; 2. Ketahanan: Memperkuat Ketahanan Sektor Keuangan dan Kemandirian Ekonomi Nasional; 3. Kesenambungan: Menjaga Kualitas Pertumbuhan Sektor Keuangan dan Ekonomi Nasional; 4. Kolaborasi: Mendorong Ketahanan dan Pertumbuhan Sektor Keuangan dengan Sinergi dan Kolaborasi.
	ISI MAKALAH	Menjaga Kepercayaan

	1. Penjaminan simpanan dan polis asuransi dan Penyelesaian klaim penjaminan secara cepat, adil dan transparan. 2. Penyelesaian penanganan perbankan (resolusi) dan asuransi secara proaktif, terukur dan bertata kelola baik. 3. Penguatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang peran LPS untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan Indonesia. LPS harus dekat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 4. Pengembangan penjaminan instrumen sektor keuangan: adaptif terhadap penjaminan produk keuangan baru sesuai mandat misalnya penjaminan emas dll. Memperkuat Daya Tahan 1. Penguatan Tata Kelola LPS yang Terintegrasi. Memperkuat kelembagaan LPS dengan mengintegrasikan mulai dari perencanaan strategis, fungsi hukum, manajemen risiko dan audit internal sehingga LPS dapat bergerak cepat, stabil dan harmonis. 2. <i>Early Warning System</i> yang Kuat dan Terintegrasi untuk Ketahanan Sektor Keuangan: Integrasi Sistem Informasi untuk Memperkuat Ekosistem Ketahanan Keuangan; Pencegahan akan lebih baik daripada pengobatan. Hal tersebut dilakukan dengan: kualitas data, pemanfaatan <i>big data & machine learning</i> dan <i>risk projection</i> untukantisipasi risiko dan kegagalan bank. Mendukung Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan 1. Memperkuat Sinergi Pusat-Daerah untuk Pembiayaan dan Pembangunan Daerah: Penguatan koordinasi KSSK untuk mendorong mobilisasi dana dan penyaluran kredit/pembiayaan daerah yang <i>targeted</i> sesuai dengan potensi masing-masing daerah termasuk pembiayaan yang berkelanjutan (<i>sustainable finance</i>). 2. Pengembangan SDM Unggul: LPS sebagai Pusat Pengembangan SDM melalui <i>capacity building, Training for Trainer (ToT)</i>, sertifikasi <i>hard & soft skills</i> dan beasiswa
--	--

	sekolah dll. Selain itu juga memperkuat kompetensi pengelola Bank (BPR/BPRS dll) dengan asesmen, dan sertifikasi risiko dll.	
	Menguatkan kolaborasi 1. Bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang diarahkan untuk memperkuat stabilitas dan pengembangan sektor keuangan Indonesia. 2. LPS dapat memperkuat KSSK dengan bersama-sama membangun mekanisme kolaborasi yang lebih terstruktur dan berbasis data. 3. Selain itu, LPS perlu membangun jembatan komunikasi dengan pemangku kepentingan eksternal (asosiasi, industri, Pemda dan masyarakat) dalam menjaga SSK dan mendorong pertumbuhan ekonomi.	
	NAMA CALON	MUHAMMAD IMAN NURIL HIDAYAT BUDI PINUJI
	JUDUL	LPS menjadi pilar yang terpercaya dalam ikut menjaga Stabilitas Sektor Keuangan, dengan memberikan kepastian dan rasa aman kepada masyarakat
	VISI DAN MISI	-
		Inisiatif Strategis
2	ISI MAKALAH	1. Tantangan: Efektivitas pelaksanaan resolusi dan kecepatan pembayaran klaim Inisiatif: Efektivitas Pelaksanaan Resolusi, Ketersediaan Dana Penjaminan, Kecepatan Pembayaran Klaim. 2. Tantangan: Kapasitas dan kapabilitas internal dalam menghadapi perkembangan lingkungan Inisiatif: Memperkuat kapasitas, kapabilitas, dan tata kelola untuk pelaksanaan resolusi yang efektif. 3. Tantangan: Menjaga kepercayaan masyarakat (<i>public confidence</i>). Inisiatif: Peningkatan koordinasi antar Lembaga, dan peningkatan efektivitas strategi komunikasi.

	4. Tantangan: Efektivitas Pemanfaatan teknologi informasi dan mitigasi risiko serangan cyber Inisiatif: Adaptif terhadap inovasi teknologi dengan tetap menjaga keamanan sistem dan data. Rencana Kerja Strategis berdasarkan Inisiatif Strategis adalah sebagai berikut: 1. Inisiatif: Efektivitas Pelaksanaan Resolusi, Ketersediaan Dana Penjaminan, Kecepatan Pembayaran Klaim. Berikut rencana kerja strategisnya: 1) Penyusunan rencana kerja pelaksanaan penjaminan polis asuransi. 2) Meningkatkan efektivitas resolusi bank dan pembayaran klaim tepat waktu. 3) Memastikan kecukupan dana penjaminan. 2. Inisiatif: Memperkuat kapasitas, kapabilitas, dan tata kelola untuk pelaksanaan resolusi yang efektif. Berikut rencana kerja strategisnya: 1) Efektivitas fungsi riset. 2) Peningkatan Tata Kelola yang baik. 3) Peningkatan kapabilitas organisasi. 3. Inisiatif: Peningkatan koordinasi antar Lembaga, dan peningkatan efektivitas strategi komunikasi. Berikut rencana kerja strategisnya: 1) Membangun kerangka kerja terpadu antar Lembaga yang didukung sistem informasi terintegrasi. 2) Perumusan strategi komunikasi yang efektif 4. Inisiatif: Adaptif terhadap inovasi teknologi dengan tetap menjaga keamanan sistem dan data. Berikut rencana kerja strategisnya:
--	---

		1) Pemanfaatan TI untuk mendukung resolusi, <i>surveillance</i>, dan peningkatan <i>public awareness</i>. 2) Digitalisasi proses bisnis penjaminan. 3) Peningkatan keamanan data dan sistem terhadap serangan <i>cyber</i>.
	NAMA CALON JUDUL VISI DAN MISI	AGRESIUS R. KADIAMAN Menapaki Dua Dekade LPS: Pilar Ketahanan Sistem Keuangan Menuju Indonesia Emas 2045 - 1. Peran Strategis LPS • LPS bertransformasi dari sekadar penjamin simpanan menjadi lembaga dengan mandat luas: resolusi bank, penjaminan polis asuransi, dan penempatan dana. • Posisi LPS semakin penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, terutama pasca lahirnya UU P2SK (2023). 2. Tantangan Utama • Keterbatasan dana dibanding total simpanan nasional. • Batas penjaminan tidak diperbarui sejak 2008. • Premi penjaminan belum berbasis risiko. • Risiko global (ekonomi, geopolitik), <i>cyber security</i>, dan disrupsi digital. • Literasi publik mengenai fungsi LPS masih rendah. 3. Peluang Menuju Indonesia Emas 2045 • Mandat baru melalui UU P2SK memperkuat peran LPS di sektor keuangan bank dan non-bank. • Digitalisasi, kolaborasi antar-lembaga (OJK, BI, DPR, FKSSK), serta kerja sama global dapat memperkuat daya tahan sistem. • Perluasan kantor perwakilan LPS akan meningkatkan jangkauan pengawasan, khususnya BPR/BPRS di daerah.

		4. Strategi 2025–2030 (Sapta Cita) • Optimalisasi fungsi resolusi bank agar lebih cepat dan efisien. • Penguatan peran penjaminan simpanan untuk meningkatkan kepercayaan publik. • Pemanfaatan teknologi digital (GRC & pengawasan internal). • Sinergi dengan otoritas terkait (OJK, BI, DPR, FKSSK). • Peningkatan literasi publik tentang penjaminan simpanan & asuransi. • Ekspansi kantor perwakilan di daerah strategis. • Persiapan mandat penjaminan dan resolusi asuransi dengan tata kelola, SDM, IT, dan proses yang lebih kuat.
	NAMA CALON	FERDINAN DWIKORAJA PURBA
	JUDUL	Penguatan Peran LPS sebagai Risk Minimizer dalam Melindungi Nasabah dan Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan
	VISI DAN MISI	-
4	ISI MAKALAH	1. Mandat Baru LPS • Dengan berlakunya UU No. 4/2023 (UU P2SK), LPS bertransformasi dari <i>loss minimizer</i> menjadi <i>risk minimizer</i>, yang berarti tidak hanya menanggung kerugian saat bank gagal, tetapi juga aktif mencegah risiko yang mengganggu stabilitas sistem keuangan. • Mandat meliputi: penjaminan simpanan, resolusi bank, penjaminan polis asuransi, serta keterlibatan lebih luas dalam pengelolaan krisis sistem keuangan. 2. Tantangan LPS • Internal: regulasi turunan UU P2SK belum lengkap, keterbatasan SDM untuk menangani bank besar, kebutuhan <i>risk-based</i> premium, dan kesiapan TI termasuk penggunaan AI untuk <i>early warning system</i>. • Eksternal: ketidakpastian ekonomi global, perkembangan <i>fintech</i> & digital <i>finance</i>, serta meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik.

	3. Langkah Strategis a) Kebijakan • Percepatan pembayaran klaim (target maksimal 7 hari kerja sesuai standar IADI). • Penerapan risk-based premium untuk mendorong disiplin pasar. • Perluasan cakupan penjaminan, termasuk konsep pass-through deposit insurance untuk dana haji, e-wallet, kustodian, dan rekening kolektif. b) Kelembagaan • Penguatan SDM berbasis kompetensi, membangun <i>leadership pipeline</i>, dan mendirikan resolution laboratory. • Pemanfaatan teknologi digital & AI untuk <i>early warning system</i> dan <i>real-time monitoring</i>. c) Komunikasi Publik • Strategi komunikasi proaktif untuk menumbuhkan kepercayaan publik. • Pemanfaatan media sosial dan edukasi publik agar fungsi LPS lebih dipahami. d) Kerja Sama & Koordinasi • Optimalisasi koordinasi dengan KSSK (BI, OJK, Kemenkeu) melalui <i>Crisis Management Protocol</i> dan integrasi data lintas otoritas. • Penguatan forum koordinasi resolusi bank dan mitigasi risiko. 4. Arah Pengembangan LPS • Dalam 5 tahun ke depan, LPS ditargetkan menjadi lembaga yang lebih adaptif, responsif, kredibel, dan terpercaya.
--	--

		Fokusnya adalah perlindungan optimal bagi nasabah, peningkatan kecepatan resolusi bank, dan kontribusi signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan nasional.
	NAMA CALON	ANGGITO ABIMANYU
	JUDUL	Meningkatkan Peran LPS dalam Stabilisasi Sektor Keuangan dan Perekonomian (Program AKSARA untuk LPS)
	VISI DAN MISI	-
5		Tujuan Program AKSARA - Dirancang untuk memperkuat literasi, edukasi, dan komunikasi publik mengenai fungsi serta peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). - Menekankan pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem penjaminan simpanan dan peran LPS dalam stabilitas keuangan nasional.
	ISI MAKALAH	Fokus Utama Program - Aktif membangun kesadaran publik. - Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan (OJK, BI, Kemenkeu, industri perbankan/keuangan). - Strategi komunikasi yang adaptif dengan perkembangan teknologi digital & media sosial. - Akselerasi literasi keuangan melalui kampanye dan konten edukasi yang mudah dipahami. - Responsif terhadap kebutuhan publik dalam memahami hak dan kewajiban sebagai nasabah. - Amanah menjaga stabilitas sistem keuangan lewat transparansi informasi.
		Tantangan yang Dihadapi Tingkat pemahaman masyarakat terkait penjaminan simpanan masih rendah.

	• Maraknya disinformasi yang dapat memicu ketidakpercayaan atau potensi <i>bank run</i>. • Kompleksitas produk keuangan baru (<i>fintech</i>, <i>e-wallet</i>, dana kolektif) yang belum sepenuhnya dipahami masyarakat terkait perlindungan simpanannya. Strategi Implementasi • Memperkuat narasi publik bahwa LPS bukan hanya penjamin simpanan, tetapi juga pilar stabilitas sistem keuangan. • Memanfaatkan platform digital (media sosial, <i>website</i> interaktif, video edukasi) untuk sosialisasi yang lebih efektif. • Menjalinkan kemitraan strategis dengan media, akademisi, asosiasi keuangan, dan komunitas daerah. • Melaksanakan program literasi keuangan berkelanjutan untuk berbagai segmen masyarakat, terutama UMKM dan kelompok rentan. Arah Pengembangan • Dengan program ini, LPS diharapkan mampu membangun <i>brand awareness</i> yang kuat, meningkatkan <i>trust</i>, serta memperkuat legitimasi sebagai lembaga yang melindungi simpanan dan menjaga stabilitas sistem keuangan. • AKSARA menjadi instrumen penting dalam memastikan LPS lebih dekat dengan masyarakat, lebih responsif, dan lebih adaptif terhadap dinamika keuangan di era digital.
--	---